

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah termasuk Dinas Perhubungan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu agendanya adalah menjalankan pemerintahan yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan yang sebaik –baiknya kepada masyarakat, serta mengembangkan Prasarana dan Sarana Transportasi di wilayah Kabupaten Malinau.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 134 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Malinau. Sebagaimana telah diubah berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Malinau nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perhubungan adalah salah satu Dinas / Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan serta menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Sebagai salah satu organisasi instansi Pemerintah yang mendapat tugas pokok dan fungsi

tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan dan tindakannya kepada Pemerintah Daerah dan Pusat.

Laporan ini sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 sebagai bahan Laporan dan pengendalian kegiatan dan tindakan dalam pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran seobyektif mungkin dengan tolak ukur atau indikator pengukuran kinerja. Pelaporan pertanggungjawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas yang merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil dan evaluasi kerja berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan memaparkan tentang Visi, Misi Organisasi serta tujuan dan sasaran yang akan di capai yang tertuang dalam Rencana Strategik. Dengan mengacu pada Renstra Organisasi di harapkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan organisasi yang juga akan dituangkan pada laporan ini sebagai bahan evaluasi pada kegiatan yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bab IV tentang kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota bagian ketiga Pasal 14 ayat (5) yang berbunyi Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 yang menyatakan “Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau merupakan salah satu dinas yang berkedudukan sebagai dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi Perhubungan.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Bab II kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pasal 249 yang berbunyi “Dinas Perhubungan Darat, angkutan Sungai dan Penyebrangan, Bidang Perhubungan Udara yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten”.

3. Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugasnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
- f. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada prioritas pembangunan, maka aspek strategis yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kab. Malinau sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan jasa transportasi yang handal, murah, aman dan lancar sebagai urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Terwujudnya SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Terpenuhinya infrastruktur Perhubungan Udara, Darat dan Sungai.
4. Terbangunnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan.
5. Terwujudnya kelembagaan yang konvrehensif di bidang Perhubungan.
6. Terwujudnya peraturan-peraturan daerah di bidang Perhubungan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan, Berdasarkan Surat Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah

Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau dengan Nomor 43 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

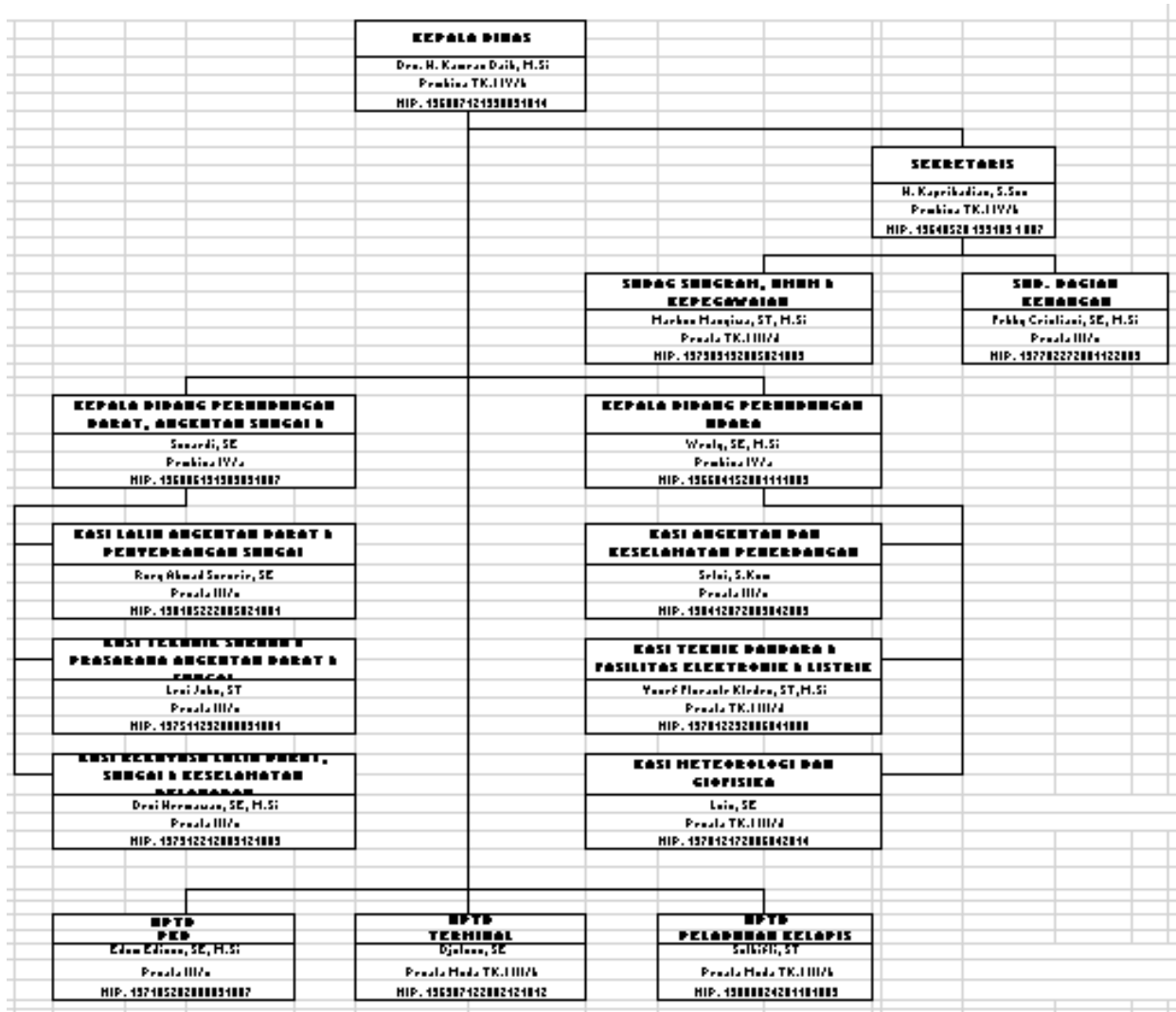
1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Perhubungan;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, membidangi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Unsur pelaksana adalah, bidang – bidang terdiri dari :

1. Bidang Perhubungan Darat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan, membawahi:
 - a. Seksi lalu Lintas dan Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;

- b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat, Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 - c. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Pelayaran.
2. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
- a. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang;
 - b. Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika dan Listrik;
 - c. Seksi Meteorologi dan Geofisika.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari ;
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau sebagaimana terlampir. (Gbr. I)



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak **109 (Seratus Sembilan)** orang terdiri dari **38 (Tiga Puluh Delapan)** orang berstatus PNS, dan **71 (Tujuh Puluh satu)** orang berstatus Tenaga Kerja Kontrak WASDAL Jumlah pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Desember 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	9
2	S1	15
3	DIII	6
4	SLTA	8
	JUMLAH	38

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Per 31 Desember 2021

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	II	1
2	III	3
3	IV	12
4	Non Eselon	22
	JUMLAH	38

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Per 31 Desember 2021

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	6
2	III	25
3	II	7
	JUMLAH	38

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S1	20
2	DIII	30
3	SLTA	25
	JUMLAH	75

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Malinau

Apabila dibandingkan dengan Struktur Organisasi serta cakupan pekerjaan yang ada jumlah sumber daya Manusia belum memenuhi standar kuantitatif maupun kualitatif apalagi jabatan fungsional yang diwajibkan untuk mempunyai lisensi kecakapan bidang tugasnya.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :

1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat, baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan jasa angkutan umum kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan yang memadai.
3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang belum memadai sehingga berdampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidakdisiplinan berlalu lintas, kesemrawutan

- berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan.
4. Fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam bentuk Marka, Rambu, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrail) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
 5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal dibidang pelayanan jasa angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai kurang optimal.
 6. Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.
 7. Kurang optimalnya sarana prasarana bongkar muat barang.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau selama tahun 2021. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar isi

Bab I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi
- G. Sistematika Penyajian

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Indikator Kinerja
 - 3. Strategi dan Arah Kebijakan
 - 4. Program
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN K INERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang perhubungan darat, sungai dan udara.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA
MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan target yang harus dicapai, maka perlu penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas.

Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi Dinas Perhubungan, untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang perhubungan, yang terbagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Perhubungan Darat dan Sungai:

- a. Meningkatkan kemampuan jalan yang sudah menurun tingkat pelayanannya.
- b. Memberikan kesempatan berusaha di bidang pelayanan jasa perhubungan secara adil, terbuka dan transparan kepada masyarakat dunia usaha.
- c. Meningkatkan mutu keselamatan pelayaran melalui penyediaan fasilitas navigasi, serta pemeliharaan alur sungai.
- d. Membangun fasilitas transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi orang dan barang dengan mempertimbangkan pola pengembangan wilayah, factor spesifik, dan pemilihan teknologi yang tepat.

2. Perhubungan Udara

- a. Membangun sarana dan prasarana transportasi udara untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi orang dan barang dengan mempertimbangkan pola pengembangan wilayah, factor spesifik dan pemilihan teknologi yang tepat.
- b. Menyediakan dan mensubsidi angkutan perintis udara yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan keselamatan penerbangan melalui penyediaan fasilitas komunikasi dan fasilitas navigasi serta pembinaan dan perbaikan armada udara bagi daerah-daerah yang sulit di jangkau sarana transportasi darat atau sungai.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau.	Persentase jumlah kota dan desa yang terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau	70%	70%	90%	98%	98%

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	Persentase jumlah desa yang terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau	Bidang Perhubungan Darat ASDP dan Bidang Perhubungan Udara
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	Inspektorat

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja dan Target Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2021	2021	
1	Persentase jumlah desa yang terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau	45%	70%	70%	90%	98%	98%	98%

Dari tabel indikator kinerja dan target Dinas Perhubungan adapun jumlah kota dan desa yang bisa di capai melalui transportasi darat, sungai dan udara pada Kabupaten Malinau, dapat dilihat pada perkembangan trayek angkutan umum sebagai berikut :

Tabel 2.4
Trayek Angkutan Umum

ANGKUTAN DARAT (Penyeberangan Orang dan Barang)	
1	Malinau - Tanjung Selor
2	Malinau - Salang
3	Malinau - Long Loreh
4	Malinau - Sesua
5	Malinau - Pulau Sapi
6	Malinau - Mansalong
7	Malinau - Setulang
8	Malinau - Setarap
9	Sungai Boh - Long Ampung
10	Long Ampung - Long Nawang
11	Long Nawang - Data Dian
12	Malinau - Long Pada
13	Malinau - Paking
14	Malinau - Long Berang
15	Malinau - Samarinda
16	Malinau - Balikpapan
ANGKUTAN SUNGAI DAN LAUT (Penyeberangan Orang dan Barang)	
1	Malinau - Tarakan

2	Pujungan - Tanjung Selor
3	Long Nawang - Dt. Dian
4	Long Ampung - Long Nawang
5	Pujungan - Bahau Hulu
6	Malinau - Long Berang
7	Tanjung Priok - Malinau
8	Nunukan - Malinau
9	Makassar - Malinau
10	Tana Tidung - Malinau
11	Biringkasi - Malinau
12	Tarjun - Malinau
13	Batu Licin - Malinau
14	Bitung - Malinau
15	Banjarmasin - Malinau
16	Tanjung Perak - Malinau
17	Gresik - Malinau
ANGKUTAN UDARA	
1	Malinau - Tarakan
2	Malinau - Data Dian
3	Malinau - Sungai Boh
4	Malinau - Long Apung
5	Malinau – Long Bawan
6	Malinau – Long Alango
7	Malinau – Long Pujungan
8	Malinau – Balikpapan

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Proses perencanaan strategis merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan mempertahankan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan , dengan demikian Strategi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan sarana angkutan darat, sungai, laut dan udara.

3. Mengendalikan kemacetan dan merekayasa lalu lintas.
4. Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan focus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara di kab. malinau	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan dan pemahaman yang terus menerus terhadap pemilik ijin Trayek Darat, Sungai, Udara - Melakukan pengecekan terus menerus terhadap arus Transportasi Darat, Sungai, dan Udara - Melakukan arahan terhadap jajaran PNS di Lingkungan Dinas Perhubungan agar dapat mengetahui dan menguasai tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam melaksanakan tugas - Melakukan pengawasan, pengecekan kelengkapan terhadap pusat – pusat ekonomi kerakyatan di 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan ijin secara berjenjang terhadap moda Transportasi Darat, Sungai, Udara - Memberikan pemasangan tanda-tanda Rambu Lalu Lintas baik Darat, Sungai dan Udara - Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku - Memberikan kemudahan terhadap ijin trayek untuk kelancaran transportasi arus barang / jasa dari pusat pelabuhan speed boat atau dermaga dan bandara

		masing – masing kecamatan. - Mengidentifikasi titik-titik rawan dan hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan di Bidang Perhubungan. - Melakukan Koordinasi dengan SKPD lainnya dalam rangka permohonan terhadap SOP dan target kinerja di Dinas Perhubungan	- Mengsosialisasikan kepada seluruh masyarakat pengguna dan pelaksana jasa perhubungan semua peraturan dan ketentuan yang harus di penuhi - Pemberian ijin sudah ada SOP dan mempunyai target kinerja yang jelas
--	--	--	---

4. Program

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau didukung oleh sumber daya antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana serta fasilitas yang memadai dan juga ditunjang oleh pendanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 yang diuraikan kedalam 7 (tujuh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan.

Adapun anggaran Program/kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rincian Anggaran Program/kegiatan tahun 2021
Dinas Perhubungan

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.775.637.755
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 376.809.500
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 1.219.816.100

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Starategis Dinas Perhubungan tahun 2021 dapat diukur. adapun Indikator kinerja dari Sasaran Strategis tersebut belum ditetapkan bersamaan dengan penyusunan LKjIP tahun 2021. Berdasarkan target yang ditetapkan tersebut, capaian Kinerja selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	1. Persentase kota dan desa yang terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau	%	98

Tabel 2.8
Rencana Kerja Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

No	Program	Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.103.437.355
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	51.708.800
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	228.586.600
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	6.500.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	999.605.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	3.385.800.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 unit	62.965.500
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1 unit	313.844.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 unit	1.000.395.000
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 unit	219.421.100

C. PERJANJIAN KINERJA

Perumusan Target Kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja. Target kinerja selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap pimpinan instansi pemerintah dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supevisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Kadri, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Yansen TP, M.Si
Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Malinau,

Dr. YANSEN TP, M.Si

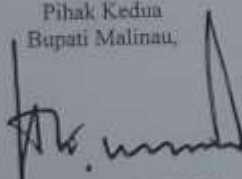
Malinau, 20 Januari 2021
Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan,


Muhamad Kadri, S.Sos, M.Si
Nip. 19670717 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALINAU**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara	- Persentase desa yang terjangkau dengan angkutan umum, transportasi sungai dan udara	98%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.539.430.492	APBD
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)	Rp 292.707.500	APBD
3.	Pengelolaan Pelayaran	Rp 1.000.395.000	APBD
	JUMLAH	Rp 10.832.532.992	

Pihak Kedua
Bupati Malinau,

Dr. YANSEN TP, M.Si

Malinau, 20 Januari 2021
Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan,

Muhamad Kadri, S.Sos, M.Si
Nip. 19670717 199803 1 004

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawabannya atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan perlu dilakukan Pengukuran tingkat kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau pada tahun 2021 telah menetapkan sasaran yang harus dicapai, untuk penjelasan masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Sarana, Barang dan Jasa, Infrastruktur Perhubungan Darat, Laut/Sungai, Dan Udara. Indikator keberhasilan sasaran ini dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terpenuhi sebagaimana yang ditargetkan dalam penyusunan Kerja Tahun 2021, yaitu berupa :
2. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rencana Kinerja ini belum ditargetkan dengan rinci, mengingat seluruh kegiatan dalam pencapaian target dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bahkan oleh Instansi Pusat sehingga untuk pencapaian dari target tergantung kesempatan yang diberikan oleh pihak penyelenggara, demikian halnya dengan sasaran yang lain, sasaran ini pencapaian masih relatif sangat kecil.

3. Adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan. Untuk mencapai sasaran ini kegiatan yang dilaksanakan adalah Subsidi Penerbangan SUSI AIR dan MAF dengan penerbangan menuju wilayah perbatasan serta adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi Darat maupun Sungai.
4. Terwujudnya Peraturan Daerah di bidang Perhubungan Darat, Sungai maupun Udara. Untuk mencapai keberhasilan sasaran ini Dinas Perhubungan berupaya untuk menyusun rancangan Perda dan Surat Keputusan Bupati dan berhasil disahkannya Peraturan Daerah sebanyak 3 (Tiga) buah, Surat Keputusan Bupati Perubahan sebanyak 1 (Satu) buah.
5. Terwujudnya Kelembagaan di bidang Perhubungan. Indikator sasaran ini adalah berhasil dibentuk, dibina dan difungsikan ORGANDA, Persatuan Ojek dan Pengemudi Becak serta GAPASDAP dan Asosiasi Pengusaha Bahan Galian Golongan C, dalam hal perijinan usaha angkutan sungai, sebagai mitra kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	Persentase Jumlah kota dan desa yang terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau	98%	95%	99%

Persentase jumlah kota dan desa yang terjangkau dengan angkutan umum, transportasi sungai dan udara

Target indikator jumlah kota dan desa yang terjangkau dengan angkutan umum, transportasi sungai dan udara tahun 2021 sebesar 98% dan terealisasi 96%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 97%. Berikut ini disajikan tabel jumlah lalu lintas darat, sungai dan udara :

Tabel 3.2
Laporan Data Lalu Lintas Angkutan Udara 2021

No	Jenis	Pesawat		Penumpang		Bagasi (kg)		Kargo (kg)	
		Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk	Dtg	Brk
1	Susi Air	805	997	5.000	6.903	51.818	81.378	4.081	33.683
2	Maf	153	156	424	481	6.181	18.479	1.327	22.964
3	Wings	174	204	5.592	9.747	1.982	2.067	0	0
Total		1.132	1.357	11.016	17.131	59.981	101.924	5.408	56.647

Tabel 3.3
Laporan Data Realisasi Angkutan Sungai Tahun 2021

No	Bulan	Speed Boad		Jumlah Penumpang Dewasa		Jumlah Penumpang Anak-anak		Total
		Brkt	Tiba	Brkt	Tiba	Brkt	Tiba	
1	Januari	154	151	4.005	3.702	261	222	8.190
2	Feb	186	186	4.699	3.263	233	261	8.456
3	Maret	183	175	3.014	3.286	139	130	6.568
4	April	52	48	811	881	9	9	1.710
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	15	16	342	244	7	1	594
7	Juli	56	46	1.679	1.090	58	23	2.850
8	Agustus	67	55	1.863	1.463	113	18	3.457
9	September	69	62	2.061	1.734	98	38	3.931
10	Oktober	66	65	1.923	1.812	94	82	3.911
11	Nopember	86	74	2.480	1.941	180	83	4.684
12	Desember	86	82	2.328	2.058	167	71	4.624
Jumlah		1.020	959	25.204	21.474	1.359	938	48.975

TABEL 3.4
REKAPITULASI KENDARAAN DAN PENUMPANG ANGKUTAN DARAT

1. Malinau - Tanjung Selor

NO	BULAN	TERAYEK	BERANGKAT		TIBA		KETERANGAN
			DEWASA	ANAK2	DEWASA	ANAK2	
1	JANUARI	BUS DAMRI	632	42	442		Reguler
2	PEBRUARI	BUS DAMRI	563	19	392	2	Reguler
3	MARET	BUS DAMRI	474	21	241		Reguler
4	APRIL	BUS DAMRI	103	2	85		Reguler
5	MEI	BUS DAMRI	0	0	0		Reguler
6	JUNI	BUS DAMRI	45	2	23		Reguler
7	JULI	BUS DAMRI	198	16	115	1	Reguler
8	AGUSTUS	BUS DAMRI	326	18	150		Reguler
9	SEPTEMBER	BUS DAMRI	320	27	190		Reguler
10	OKTOBER	BUS DAMRI	366	21	118		Reguler
11	NOPEMBER	BUS DAMRI	386	33	210		Reguler
12	DESEMBER	BUS DAMRI	360	44	194	7	Reguler
JUMLAH			3.773	245	2.160	10	

2. Malinau - Salang

NO	BULAN	TERAYEK	BERANGKAT		TIBA		KETERANGAN
			DEWASA	ANAK2	DEWASA	ANAK2	
1	JANUARI	BUS DAMRI	319	29	181	24	Reguler
2	PEBRUARI	BUS DAMRI	238	17	137	22	Reguler
3	MARET	BUS DAMRI	226	9	96	19	Reguler
4	APRIL	BUS DAMRI	77	2	54	4	Reguler
5	MEI	BUS DAMRI	1	0	0	0	Reguler
6	JUNI	BUS DAMRI	41	3	20	2	Reguler
7	JULI	BUS DAMRI	176	10	79	4	Reguler
8	AGUSTUS	BUS DAMRI	184	7	57	2	Reguler
9	SEPTEMBER	BUS DAMRI	110	13	56	4	Reguler
10	OKTOBER	BUS DAMRI	158	17	58	8	Reguler
11	NOPEMBER	BUS DAMRI	381	18	103	12	Reguler
12	DESEMBER	BUS DAMRI	272	31	136	16	Reguler
JUMLAH			2.183	156	977	117	

3. Malinau - Long Loreh

NO	BULAN	TERAYEK	BERANGKAT		TIBA		KETERANGAN
			DEWASA	ANAK2	DEWASA	ANAK2	
1	JANUARI	TAXI	292	3	232	4	Reguler
2	PEBRUARI	TAXI	233	10	211	1	Reguler
3	MARET	TAXI	306	15	271	4	Reguler
4	APRIL	TAXI	34		34		Reguler
5	MEI	TAXI	60		49		Reguler
6	JUNI	TAXI	110	8	85	4	Reguler
7	JULI	TAXI	130	6	111	5	Reguler
8	AGUSTUS	TAXI	105	6	96	3	Reguler
9	SEPTEMBER	TAXI	121	5	107	3	Reguler
10	OKTOBER	TAXI	135	4	132	1	Reguler
11	NOPEMBER	TAXI	115	5	105	1	Reguler
12	DESEMBER	TAXI	143	6	126	4	Reguler
JUMLAH			1.784	68	1.559	26	

4. Malinau - KTT,Tg Selor, Berau, Balikpapan, Samarinda

NO	BULAN	NON TERAYEK	BERANGKAT		TIBA		KETERANGAN
			DEWASA	ANAK2	DEWASA	ANAK2	
1	JANUARI	DELTA TRAVEL	246	1	0	0	Non Reguler
2	PEBRUARI	DELTA TRAVEL	212	1	0	0	Non Reguler
3	MARET	DELTA TRAVEL	165	1	0	0	Non Reguler
4	APRIL	DELTA TRAVEL	76	0	0	0	Non Reguler
5	MEI	DELTA TRAVEL	68	0	0	0	Non Reguler
6	JUNI	DELTA TRAVEL	130	0	0	0	Non Reguler
7	JULI	DELTA TRAVEL	140	0	0	0	Non Reguler
8	AGUSTUS	DELTA TRAVEL	165	0	0	0	Non Reguler

9	SEPTEMBER	DELTA TRAVEL	160	0	0	0	Non Reguler
10	OKTOBER	DELTA TRAVEL	148	1	0	0	Non Reguler
11	NOPEMBER	DELTA TRAVEL	177	1	0	0	Non Reguler
12	DESEMBER	DELTA TRAVEL	214	0	0	0	Non Reguler
	JUMLAH		1.901	5			

TABEL 3.5
REKAPITULASI BONGKAR MUAT BARANG TA 2021

NO	BULAN	AKTIFITAS PELAYARAN		JUMLAH	AKTIFITAS BONGKAR MUAT BARANG												JUMLAH		
		BRKT	TIBA		MUAT (TON)						BONGKAR (TON)						MUAT	BONGKAR	
					BC	BBM	CPO	CR	SM	KEND	BC	BBM	CP	CR	SM	KEND			
1	JANUARI	7	7	14	0	0	0	0	0	0	2.898	85	0	0	3.725	0	0	6.708	
2	FEBRUARI	7	7	14	0	0	966	504	0	0	3.145	0	0	0	1.000	0	1.470	4.145	
3	MARET	3	3	6	0	0	0	0	0	0	2.353	0	0	0	1.000	0	0	3.353	
4	APRIL	6	6	12	0	0	2.002	0	0	0	1.326	0	0	0	5.323	0	2.002	6.649	
5	MEI	9	9	18	0	0	2.136	380	0	0	1.250	0	0	0	4.494	0	2.516	5.744	
6	JUNI	3	3	6	0	0	0	0	0	0	1.753	0	0	0	1.100	0	0	2.859	
7	JULI	7	7	14	0	0	1.164	375	0	0	2.915	0	0	0	1.100	0	1.539	4.015	
8	AGUSTUS	6	6	12	0	0	962	0	0	0	2.573	0	0	0	2.178	0	962	4.751	
9	SEPTEMBER	9	9	18	2	2	0	999	380	0	0	4.883	0	0	0	1.800	0	1.401	6.683
10	OKTOBER	5	5	10	0	0	0	0	0	0	3.574	0	0	0	1.000	0	0	4.574	
11	NOPEMBER	6	6	12	4	5	0	950	376	0	0	2.500	0	0	0	3.193	0	1.371	5.693
12	DESEMBER	8	8	16	0	0	0	939	0	0	0	3.840	0	0	0	5.300	0	939	9.140
	JUMLAH	76	76	152	6	7	0	10.118	2.015	0	0	33.010	85	0	0	31.213	0	12.200	64.314

Presentase jumlah ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan transportasi darat, sungai, laut dan udara di Kabupaten Malinau guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 98% dengan realisasi sebesar 95% sehingga capaian kerjanya sebesar 99%, dengan capaian sebesar 99% maka realisasi indikator presentase tersedianya angkutan umum yang melayani kota dan desa yang terjangkau dengan angkutan umum, transportasi sungai dan udara yang telah tersedia di Kabupaten Malinau sesuai dengan kebutuhan dan akan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Perjanjian Kinerja disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
					Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	Persentase Jumlah kota dan desa yang terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau	%	96	98	95	99

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki fasilitas perhubungan yang layak} \times 100\%}{\text{jumlah seluruh Kecamatan}}$$

(Jumlah (komulatif) Kecamatan yang memiliki sarana, prasarana, fasilitas perhubungan yang layak dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%)

Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan, target capaian kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 98% dengan realisasi sebesar 96% sehingga capaian kerjanya sebesar 97%.

Pengukuran Presentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik} (\dots \text{ unit})}{\text{Jumlah sarana dan prasarana Perhubungan yang ada} (\dots \text{ unit})} \times 100\%$$

No	Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang ada	Sarana dan prasarana dalam kondisi baik
1	Gedung kantor	1	1
2	Halte	5	2
3	Dermaga/Pelabuhan	2	2
4	Terminal	2	1
5	Kend. Oprasional	3	3
6	Unit PKB	1	0
7	Cermin T	3	0
8	Traffic Light	3	3
9	Zebra Cross Penyeberangan	9	4
10	Alat Timbang KIR	1	1
11	Lahan Parkir	0	0

Jumlah	27	15
---------------	----	----

Sedangkan pengukuran presentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah presentase jumlah ketersediaan kapal sungai dan danau yang melayani jaringan trayek dalam Kabupaten Malinau pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kapal sungai dan danau yang sudah tersedia untuk melayani jaringan trayek dalam kab/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari} \quad (\dots \text{ unit})}{\text{Jumlah kapal sungai dan danau yang seharusnya tersedia untuk melayani jaringan trayek dalam kab/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari} \quad (\dots \text{ unit})} \times 100\%$$

No	Kapal sungai dan danau yang tersedia	Kapal sungai dan danau yang seharusnya ada
1	13 unit	9 unit

Adapun pengukuran presentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota} \quad (\dots \text{ unit})}{\text{Jumlah angkutan umum yang seharusnya ada yang Melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kab/kota} \quad (\dots \text{ unit})} \times 100\%$$

No	Angkutan umum yang ada (siap beroperasi)	Angkutan umum yang seharusnya ada dan siap beroperasi
1	18 unit	20 unit

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Renstra Tahun-					Persentase Capaian Terhadap Target Renstra Tahun -				
					2017	2018	2019	2021	2021	2017	2018	2019	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5/6*100	12=5/7*100	13=5/8*100	14=5/9*100	15=5/10*100
1	Meningkatnya sarana dan prasarana moda transportasi di Kabupaten Malinau	Persentase Jumlah desa yang terjangkau dengan moda transportasi di Kabupaten Malinau udara	%	96	94	95	96	97	98	100	100	100	100	100

Faktor pendukung keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik dan memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal
2. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten Malinau serta terjalannya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman

Hambatan/Permasalahan :

1. Ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dan perlu adanya perbaikan dan rehabilitasi
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mentaati peraturan tata tertib berlalu lintas

Pemecahan Masalah :

1. Perlunya melakukan rehabilitasi pada sarana dan prasarana Perhubungan terutama pada sarana dan prasarana pelayanan publik seperti terminal, dermaga dan angkutan umum

2. Perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap lalu lintas jalan serta koordinasi yang baik antar elemen dan perlunya peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan.











C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Rutin Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 8.838.998.255,00,-** Sedangkan anggaran Pembangunan sebesar **Rp. 2.533.265.100,00,-**. Adapun realisasi Keuangan Anggaran Rutin OPD tahun 2021, adalah sebesar **Rp. 8.675.859.963,00,-** atau terealisasi sebesar **98,15%** Sedangkan realisasi Keuangan Anggaran Pembangunan SKPD, adalah sebesar **Rp. 2.266.160.000,00,-** terealisasi **89,46%** dari tahun anggaran 2021.

Dengan demikian jumlah Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021, baik Anggaran Rutin dan Pembangunan, adalah sebesar **Rp. 11.372.263.355,-** terealisasi Sebesar **Rp. 10.942.019.963,-** atau **99,60 %**.

1. Tabel (1) Belanja Rutin.

No	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	REALISASI	%
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.103.437.355	5.021.828.909	98,40
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	228.586.600	191.632.900	93,64
3	Penyediaan bahan logistik kantor	51.708.800	51.700.800	100
4	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	6.500.000	6.500.000	100
5	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.385.800.000	3.341.234.354	99,24
6	Pengadaan pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	62.965.500	62.963.000	100
	Jumlah	8.838.998.255	8.675.859.963	98.15

2. Tabel (2) Belanja Pengadaan Kendaraan dan Pembangunan.

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (DAK)	999.605.000	823.274.000	82,36

2.	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau (DAK)	1.000.395.000	934.280.900	93,39%
3.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	219.421.100	212.421.100	100
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	313.844.000	296.184.000	94,37
JUMLAH		2.533.265.100	2.266.160.000	89,86

Berdasarkan evaluasi dan analisis yang telah disampaikan diatas maka dapat kita ketahui pada tahun 2021 ini Dinas Perhubungan dapat mencapai seluruh sasaran yang telah ada dengan baik. Adapaun sasaran tersebut adalah :

1. Terpenuhinya infrastruktur Perhubungan Darat, Laut/Sungai dan darat.
2. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Adanya Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan.
4. Terwujudnya Peraturan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Sungai.
5. Terwujudnya kelembagaan di bidang Perhubungan.

Dari kegiatan – kegiatan yang telah disampaikan ternyata, seluruhnya dapat dicapai dengan cukup baik. Namun demikian di masa yang akan datang masih dipandang perlu dilakukan perbaikan yang menjadi strategi pemecahan masalah, antara lain :

1. Berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pegawai yang ada dengan cara mengikut sertakan pada pendidikan dan pelatihan serta pembinaan secara intensif.
2. Berusaha untuk memaksimalkan pelayanan serta memperluas cakupan sasaran sehingga semakin mendekati terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

3. Meningkatkan koordinasi penanganan masalah di lapangan dengan instansi / jajaran terkait.
4. Lebih meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan Perhubungan.
5. Penyediaan prasarana dan sarana Perhubungan yang menuju prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung operasional Perhubungan.
6. Pengajuan Peraturan Daerah sebagai landasan operasional di lapangan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan Kebijakan Yang dipercayakan dalam Tahun Anggaran 2021.

Demikian disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai media yang masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi SKPD ke depan dalam rangka mewujudkan Perhubungan, Sebagai Urat Nadi Pembangunan Perekonomian menuju terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Malinau yang berkeadilan melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Malinau, Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan

MUHAMAD KADRI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP: 19670717 199803 1 004

